



Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Di SMP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa

Implementation Of The Internal Education Quality Assurance System at SMP Negeri 1 Sungguminasa, Gowa Regency

Nirwana Syah¹, Faridah², Sumarlin Mus³

Universitas Negeri Makassar

Email: nirwanasyahrullah@gmail.com^{1*}, idaohan@gmail.com², sumarlin.mus@unm.id³

Article Info

Article history:

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Published : 08-07-2026

Abstract

This study examines the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) at SMP Negeri 1 Sungguminasa, Gowa Regency, which is due to the less than optimal achievement of National Education Standards (SNP) even though the quality assurance structure and documents are available. The study aims to analyze the implementation of SPMI through the PPEPP cycle (Mapping, Planning, Implementation, Evaluation, and Standard Setting) and identify supporting and inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative with a naturalistic approach. Data were obtained through in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies of the principal, the School Education Quality Assurance Team (TPMPS), and teachers. The results of the study indicate that the implementation of SPMI has been running according to the formal structure, but has not been fully internalized in the school's quality culture. The implementation is still administrative and does not involve all school components in a participatory manner. This study concludes that improving the quality of education requires not only adequate structures and documents, but also a transformation of quality culture and strengthening the capacity of education actors in understanding and implementing quality values as a whole.

Keywords: *Implementation, Internal quality assurance*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) meskipun struktur dan dokumen penjaminan mutu telah tersedia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP (Pemetaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Penetapan Standar) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI telah berjalan sesuai struktur formal, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya mutu sekolah. Pelaksanaan masih bersifat administratif dan kurang melibatkan seluruh komponen sekolah secara partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan tidak hanya struktur dan dokumen yang memadai, tetapi juga transformasi budaya mutu dan penguatan kapasitas aktor pendidikan dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai mutu secara menyeluruh.

Kata Kunci: Rapor Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pembelajaran



PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar di tengah kompleksitas sistem pendidikan nasional yang mengharuskan setiap satuan pendidikan mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara merata. Di berbagai sekolah menengah pertama negeri, termasuk di Kabupaten Gowa, pelaksanaan proses pendidikan belum sepenuhnya menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan karena kurang optimalnya pengelolaan mutu internal sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun SMP Negeri 1 Sungguminasa telah memiliki Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal seperti keterbatasan sarana prasarana, lemahnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pencapaian SNP (Putra & Widnyani, 2020). Keadaan ini menunjukkan pentingnya peninjauan terhadap strategi implementasi SPMI agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Secara teoritis, sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dalam lingkup satuan pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbud No. 28 Tahun 2016. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI di berbagai sekolah masih belum optimal karena terbatas pada pemenuhan administratif semata tanpa diikuti penguatan budaya mutu dalam proses pembelajaran (Zahrok, 2020). Selain itu, kualitas pelaksanaan SPMI juga sangat tergantung pada dukungan dari kepala sekolah, kapasitas TPMPS, serta partisipasi seluruh warga sekolah, yang sayangnya belum sepenuhnya maksimal pada sebagian besar sekolah menengah (Darmaji et al., 2019). Fakta ini mempertegas adanya celah antara teori implementasi SPMI dan realitas praktik di sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk menggambarkan proses pelaksanaan SPMI berdasarkan lima siklus utama, yaitu pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan peningkatan mutu, evaluasi, dan penetapan standar mutu baru. Dengan mendalami proses dan tahapan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat implementasi SPMI, serta strategi yang diterapkan oleh TPMPS dalam rangka memenuhi indikator SNP secara berkelanjutan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa kualitas satuan pendidikan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan berkelanjutan. Mengingat masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam implementasi SPMI di SMP Negeri 1 Sungguminasa, maka sangat penting untuk dilakukan kajian mendalam agar diperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan sistem tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian dan kondisi faktual sekolah, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan model implementasi SPMI yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam membenahan mutu pendidikan di sekolah.



Konsep mutu dalam konteks pendidikan dipahami sebagai derajat pencapaian tujuan pendidikan yang mencerminkan kesesuaian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan pendidikan. Dalam pengertian yang lebih luas, mutu tidak hanya berkaitan dengan hasil belajar siswa, tetapi juga menyangkut keseluruhan proses pendidikan, termasuk manajemen, fasilitas, tenaga pendidik, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Ita, 2018). Pandangan ini menekankan bahwa mutu pendidikan harus dinilai dari keterpaduan antara input, proses, dan output pendidikan yang berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan (Qolbi & Susiawati, 2024).

Manifestasi mutu pendidikan di sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa dimensi utama, yaitu mutu akademik, mutu manajerial, dan mutu pelayanan. Mutu akademik berkaitan dengan hasil belajar dan penguasaan kompetensi siswa; mutu manajerial mencerminkan efisiensi dan efektivitas tata kelola sekolah; sementara mutu pelayanan menyangkut kepuasan stakeholder pendidikan terhadap layanan yang diberikan sekolah (Asrin et al., 2021). Sekolah-sekolah yang unggul pada umumnya memiliki kemampuan dalam menyinergikan ketiga dimensi tersebut secara harmonis, didukung oleh budaya mutu yang kuat dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Mutu sekolah merujuk pada keseluruhan kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu satuan pendidikan yang mencerminkan pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan serta adaptabilitas terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, mutu sekolah tidak hanya diukur melalui prestasi akademik siswa, tetapi juga dari indikator seperti kepemimpinan kepala sekolah, efektivitas pengajaran, partisipasi orang tua, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah (Palettei & Sulfemi, 2021). Konsep ini menegaskan bahwa mutu sekolah merupakan representasi dari sinergi semua elemen pendidikan yang terlibat dalam satuan pendidikan.

Manifestasi mutu sekolah dapat dikategorikan dalam dimensi input (sumber daya manusia, sarana prasarana), proses (strategi pembelajaran, manajemen kelas), dan output (prestasi siswa, tingkat kelulusan, kepuasan stakeholder). Selain itu, mutu sekolah juga mencakup proses evaluasi diri sekolah dan tindak lanjutnya dalam bentuk perencanaan strategis untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Muchtarom et al., 2019). Implementasi evaluasi diri sekolah secara konsisten menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas upaya peningkatan mutu sekolah.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan serangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan. SPMI menekankan pada siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Noor, 2020). Konsep ini menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dalam mewujudkan budaya mutu sebagai bagian dari manajemen berbasis sekolah.

Pelaksanaan SPMI dimanifestasikan melalui lima siklus utama: pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan program peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta penetapan standar baru. Setiap siklus SPMI melibatkan pengumpulan data melalui evaluasi diri sekolah (EDS), analisis capaian SNP, dan penyusunan rencana strategis peningkatan mutu yang berbasis data (SUPARMAN & MUHAMMAD, 2024). Penerapan SPMI yang baik menuntut adanya pengawasan berkelanjutan dan penguatan kapasitas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan objek kajiannya pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai sebuah fenomena manajerial dalam konteks pendidikan menengah pertama, khususnya di SMP Negeri 1 Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Fenomena yang diteliti berakar pada ketimpangan antara kebutuhan peningkatan mutu berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan realitas pelaksanaan SPMI yang masih mengalami berbagai hambatan internal di sekolah tersebut. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pelaksanaan teknis SPMI secara administratif, tetapi juga memeriksa bagaimana siklus penjaminan mutu dijalankan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), termasuk faktor pendukung dan penghambatnya dalam memastikan kualitas layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan naturalistik, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas implementasi SPMI dalam konteks lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap fenomena sosial dan budaya yang menyertai proses penjaminan mutu di sekolah. Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan dokumen Rapor Mutu yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan SPMI di sekolah.

Sumber informasi dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah. Informan utama terdiri dari kepala sekolah, ketua Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), dan guru-guru yang menjadi anggota TPMPS atau terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan peran strategis dan keterlibatan aktif mereka dalam siklus SPMI. Di samping itu, dokumen-dokumen administratif dan hasil evaluasi mutu yang dimiliki sekolah digunakan sebagai sumber data sekunder yang sangat penting dalam memperkuat keabsahan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Proses penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan kepala sekolah, ketua TPMPS, dan guru, observasi langsung terhadap aktivitas penjaminan mutu di sekolah, serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Triangulasi metode dan sumber diterapkan untuk meningkatkan validitas data. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk menangkap dinamika implementasi SPMI secara alami di lingkungan sekolah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi kontekstual dari setiap informan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring, memilih, dan mengelompokkan data yang relevan sesuai fokus penelitian, yaitu implementasi SPMI. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk matriks atau narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif, dengan mengacu pada keseluruhan data yang telah diverifikasi melalui triangulasi. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki



validitas internal yang tinggi dan mencerminkan kondisi riil di lapangan secara holistik dan sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Sungguminasa telah menjadi perhatian utama bagi pihak sekolah, yang ditandai dengan pembentukan dan pengaktifan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). TPMPS menjalankan peran sebagai pelaksana teknis penjaminan mutu dengan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program peningkatan mutu berbasis hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Data wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa pelaksanaan EDS dilakukan setiap tahun, dan hasilnya menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan tahunan yang berorientasi pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Eksplanasi dari data tersebut memperlihatkan bahwa komitmen terhadap mutu telah melembaga dalam kebijakan internal sekolah melalui prosedur standar dan perencanaan berbasis data. Dokumen Rapor Mutu dan hasil EDS yang diperoleh menunjukkan beberapa indikator SNP, seperti standar isi, proses, dan sarana prasarana, berada dalam kategori cukup, sementara standar lainnya masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan mutu dilakukan melalui pelatihan guru, peningkatan partisipasi warga sekolah, serta pengadaan sarana belajar. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan mutu pendidikan.

Relasi antara data dan eksplanasi mengenai mutu pendidikan dengan permasalahan utama penelitian menunjukkan adanya gap antara perencanaan penjaminan mutu yang telah disusun dengan capaian hasil di lapangan. Meskipun terdapat instrumen dan struktur organisasi pendukung pelaksanaan SPMI, pencapaian mutu pendidikan belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan masih terbatas pada aspek administratif dan kurang menyentuh substansi pembelajaran serta budaya mutu sekolah. Hal ini menegaskan bahwa penerapan sistem mutu masih perlu penguatan dalam aspek implementatif dan evaluatif.

Berdasarkan data hasil observasi dan dokumentasi, mutu sekolah di SMP Negeri 1 Sungguminasa ditandai dengan adanya peningkatan pada beberapa aspek seperti keterlibatan warga sekolah dalam kegiatan penjaminan mutu, keteraturan dalam perencanaan program tahunan, serta partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Guru secara aktif dilibatkan dalam penyusunan program kerja yang berbasis hasil evaluasi mutu, dan siswa diberi ruang dalam pengembangan diri melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Namun, masih ditemukan rendahnya antusiasme siswa dalam kegiatan non-akademik serta keterbatasan sarana yang mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif.

Eksplanasi dari data tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu sekolah telah dilakukan melalui perencanaan strategis oleh TPMPS dan dukungan kepala sekolah dalam penyediaan anggaran pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mutu. Akan tetapi, partisipasi siswa dan guru dalam kegiatan peningkatan mutu belum merata. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa guru belum sepenuhnya memahami urgensi EDS sebagai dasar penyusunan program sekolah, sehingga penyelarasan antara hasil evaluasi dan implementasi kegiatan peningkatan mutu



menjadi kurang maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perwujudan mutu sekolah masih terkendala oleh persepsi yang bervariasi tentang pentingnya budaya mutu.

Relasi antara data dan eksplanasi mengenai mutu sekolah dengan masalah penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur penjaminan mutu telah dibentuk, pengaruhnya terhadap peningkatan mutu sekolah masih terbatas. Hal ini dikarenakan belum adanya integrasi menyeluruh antara visi mutu, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan hasil evaluasi mutu dalam perencanaan pembelajaran. Dengan demikian, mutu sekolah sebagai representasi dari efektivitas implementasi SPMI belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya kolaborasi antar komponen sekolah dan rendahnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

Penelitian menemukan bahwa siklus pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 1 Sungguminasa telah dilaksanakan secara sistematis melalui lima tahapan: pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan peningkatan mutu, evaluasi, dan penetapan standar baru. Pemetaan mutu dilakukan dengan menganalisis data hasil EDS yang dijadikan dasar penyusunan program peningkatan mutu. Rencana tersebut dilaksanakan melalui kegiatan seperti pelatihan guru, peninjauan perangkat pembelajaran, dan penguatan supervisi akademik. Evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan secara berkala, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan skor SNP dalam Rapor Mutu sekolah.

Eksplanasi dari data tersebut memperlihatkan bahwa implementasi SPMI telah sesuai dengan panduan pelaksanaan yang diamanatkan dalam regulasi nasional. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam menjaga siklus mutu tetap berjalan, sedangkan TPMPS menjadi pelaksana teknis di lapangan. Namun, ditemukan kendala berupa keterbatasan waktu pelaksanaan EDS, kurangnya pemahaman sebagian guru terhadap makna penjaminan mutu, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Dokumentasi hasil SPMI masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan sekolah.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi mengenai penjaminan mutu internal dengan masalah penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem telah berjalan, terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan esensi dari SPMI itu sendiri. Implementasi yang seharusnya bersifat partisipatif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan justru terhambat oleh rutinitas administratif dan persepsi bahwa penjaminan mutu adalah kewajiban struktural semata. Dengan demikian, tantangan utama dalam implementasi SPMI di SMP Negeri 1 Sungguminasa terletak pada transformasi budaya mutu dan peningkatan kapasitas aktor pelaksana di sekolah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI di SMP Negeri 1 Sungguminasa telah dilaksanakan melalui struktur dan tahapan formal seperti pembentukan TPMPS, pelaksanaan EDS, serta penyusunan rencana kerja tahunan. Namun, pelaksanaan masih didominasi pendekatan administratif, dengan keterbatasan pada dimensi partisipasi, penguatan budaya mutu, serta pemanfaatan hasil evaluasi secara maksimal dalam pengambilan keputusan sekolah. Meskipun instrumen dan mekanisme telah tersedia, pelaksanaannya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik keseharian aktor sekolah.

Penelitian ini memperkuat temuan (Zahrok, 2020) yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah sering kali terjebak dalam pelaksanaan SPMI sebagai formalitas tanpa pemaknaan substantif terhadap mutu pendidikan. Namun, berbeda dengan penelitian di SMPN 1 Penebel



(Sumeyasa et al., 2020) yang sudah menjalankan SPMI secara menyeluruh dalam semua dimensi mutu, studi ini menunjukkan bahwa kelemahan implementasi tidak hanya bersumber pada aspek struktural, tetapi juga pada pemahaman aktor terhadap siklus PPEPP. Oleh karena itu, keunggulan studi ini adalah kemampuannya membedah proses internal secara holistik, termasuk peran persepsi dan kapasitas sumber daya manusia sekolah dalam menentukan efektivitas SPMI.

Refleksi dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan SPMI tidak dapat hanya bergantung pada kelengkapan dokumen dan pelaporan, tetapi memerlukan penguatan budaya mutu sebagai fondasi utama. Penelitian ini membuktikan bahwa ketika siklus PPEPP dijalankan tanpa keterlibatan aktif guru dan kepala sekolah dalam proses reflektif, maka peningkatan mutu akan stagnan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatoris dan internalisasi nilai mutu dalam pelaksanaan SPMI.

Implikasi dari penelitian ini terletak pada perlunya integrasi pendekatan teknokratis dan kultural dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen perencanaan seperti RKS dan EDS hanya menjadi efektif apabila disertai dengan komitmen dan kepemimpinan transformatif di tingkat satuan pendidikan. Hal ini memberikan arah kebijakan bahwa pelatihan SPMI seharusnya tidak hanya fokus pada pengisian instrumen, tetapi juga pada pengembangan kapasitas kritis dan reflektif aktor sekolah dalam menganalisis mutu secara kontekstual (Ndoluanak et al., 2024).

Hasil penelitian yang menunjukkan dominasi pendekatan administratif dalam SPMI tidak terlepas dari tradisi birokratis dalam manajemen pendidikan Indonesia, di mana kebijakan mutu lebih ditekankan sebagai kewajiban struktural dibanding proses pembelajaran organisasi. Sekolah cenderung melaksanakan EDS sebagai prasyarat administratif ketimbang instrumen strategis perbaikan mutu, yang diperparah oleh keterbatasan literasi mutu di kalangan guru dan manajer sekolah (Ferils & Syafaruddin, 2020).

Berdasarkan temuan penelitian ini, tindakan yang perlu diambil meliputi penguatan kapasitas aktor sekolah melalui pelatihan berbasis praktik terbaik SPMI, peningkatan pemahaman terhadap siklus PPEPP secara komprehensif, serta pembentukan budaya reflektif dalam pengambilan keputusan mutu. Selain itu, perlu adanya pengawasan berkelanjutan dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan yang tidak hanya mengevaluasi dokumen, tetapi juga mendampingi implementasi nilai-nilai mutu dalam keseharian aktivitas pendidikan (Warta et al., 2024).

KESIMPULAN

Satu hal yang menjadi temuan penelitian ini adalah bahwa meskipun seluruh tahapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah secara formal diterapkan di SMP Negeri 1 Sungguminasa, mulai dari pemetaan mutu hingga penetapan standar baru, implementasinya ternyata belum menyentuh esensi pembentukan budaya mutu di lingkungan sekolah. Di balik tampilan administratif yang rapi, ditemukan bahwa sebagian besar proses dijalankan tanpa internalisasi nilai-nilai mutu oleh para pelaksana di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penjaminan mutu tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur dan dokumen pendukung, tetapi sangat ditentukan oleh kedalaman pemahaman, kesadaran reflektif, dan partisipasi autentik dari seluruh warga sekolah. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan umum bahwa pemenuhan prosedural SPMI sudah cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan secara substansial.



Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori implementasi mutu pendidikan, khususnya dalam menekankan pentingnya pendekatan kultural dan partisipatif dalam pelaksanaan SPMI. Secara teoritis, studi ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika implementasi PPEPP dalam konteks sekolah menengah dengan menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis saja tidak memadai tanpa dukungan budaya mutu yang kuat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah-sekolah lain dan pemangku kebijakan dalam mendesain program pelatihan SPMI yang lebih berorientasi pada penguatan kapasitas reflektif dan kolaboratif para aktor pendidikan. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan pentingnya pengawasan pendampingan yang tidak hanya fokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga menilai proses internalisasi nilai-nilai mutu dalam praktik keseharian sekolah.

Keterbatasan dalam penelitian ini lebih terletak pada fokus ruang lingkup studi yang hanya dilakukan pada satu satuan pendidikan di jenjang SMP, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan kehati-hatian terhadap konteks sekolah lainnya. Namun demikian, keterbatasan ini justru membuka peluang luas untuk penelitian selanjutnya yang dapat mengeksplorasi implementasi SPMI pada berbagai level pendidikan, termasuk di daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada pengembangan model pendampingan SPMI berbasis partisipasi guru dan siswa, serta eksplorasi penggunaan teknologi digital untuk mendukung monitoring dan evaluasi mutu pendidikan yang lebih adaptif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaji, D., Supriyanto, A., & Timan, A. (2019). Sistem penjaminan mutu internal sekolah untuk meningkatkan mutu lulusan. *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(3), 130–137.
- Ferils, M., & Syafaruddin, S. (2020). Implementasi Sistem penjaminan mutu internal Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. *COMPETITIVENESS*, 9(1), 21–36.
- Ita, I. (2018). Implementasi manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 9(1), 23–33.
- Ndoluanak, Y. H., Husnorofik, Z., Riyadi, R., & Ridwan, A. (2024). Urgensi sistem penjaminan mutu internal terhadap peningkatan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(2).
- Palettei, A. D., & Sulfemi, W. B. (2021). Tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap implementasi standar pengelolaan pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 38–53.
- Qolbi, M. N., & Susiawati, W. (2024). Kurikulum Merdeka: Kurikulum Berorientasi Masa Depan. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(4), 1262–1280.
- Sumeyasa, I. N., Sunu, I., & Ariawan, I. P. W. (2020). Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di sekolah model kabupaten tabanan (studi kasus di SMP negeri 1 penebel). *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 11(2), 75–84.
- SUPARMAN, S., & MUHAMMAD, M. (2024). KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI PENDIDIKAN DASAR: ANALISIS IMPLEMENTASI DAN HASIL. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 210–218.



- Warta, W., Sulastriningsih, K., & Umronih, D. (2024). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (spmi) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan: Implementation of the internal quality assurance system (spmi) in improving the quality of education services. *Technomedia Journal*, 9(1), 17–30.
- Zahrok, A. L. N. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2), 196–204.